

ISLAM DAN PANCASILA: Sebuah Tinjauan Historis-Edukatif

M. Furqon Hidayatullah

Disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), di Pose In Hotel Surakarta, tanggal 23 Nopember 2017



SEMINAR NASIONAL



**“Harmonisasi Pancasila dan Agama :
Memantapkan Iklim Kondusif
Membangun Bangsa”**



Dr. Heri Santoso, S.S., M.Hum
Dosen Fak. Filsafat UGM
Kepala Pusat Studi Pancasila UGM



Prof. Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd
Dosen FKIP UNS
Direktur Pascasarjana UNS

**Kamis,
23 November 2017**
Jam 08 - Selesai
**POSE IN HOTEL
SURAKARTA**

#1 Pendaftaran

**Pendaftaran:
Mengisi formulir di:
seminar.uns.ac.id
Transfer biaya pendaftaran.**

CP dan Pendaftaran :
085647470154 (Wendy)
085642071822 (Erna)
085741414410 (Farida)

Peserta:
Dosen/Umum : 150.000 IDR
Mahasiswa : 100.000 IDR

#2 Call for Paper

1. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran Pkn
2. Hubungan Pancasila dan Agama dalam perspektif sejarah
3. Menggali nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada Agama
4. Harmonisasi Agama dan Pancasila untuk upaya deradikalisasi
5. Pancasila sebagai jiwa bangsa dalam penguatan pendidikan karakter

Pendaftaran Paper: Dosen/Umum : 250.000 IDR
Mahasiswa : 150.000 IDR
Wa/Sms:
085786551495 (Laili)
Pengiriman karya:
lailimufatakhah@student.uns.ac.id

Prosiding ISBN

Deadline Paper
15 November 2017

#3 Fasilitas

- * Sertifikat
- * Seminar kit
- * Coffee break
- * Makan siang

Pembayaran ke:

Rekening Bank Mandiri: 1380014650407
A.n.Wendy Librata RM

Penyelenggara:
Prodi Magister PPKN
Pascasarjana UNS

Sesuai dengan yang penulis anut, yakni dan penulis pahami, kajian agama yang dibahas dalam tulisan ini adalah Islam.

Setelah kira-kira 70 tahun Indonesia merdeka: Adanya kesan yang sangat terasa: “Adanya Dikotomi antara Agama dan Pancasila”. Adanya kesan seakan-akan bahwa orang yang ‘Pancasilais’ jauh dari agama, sebaliknya bahwa orang yang taat beragama seakan-akan ‘Tidak Pancasilais’.

LATAR BELAKANG

- NKRI: Seakan-akan tanpa Islam
- Dikotomi: Pancasila >< Agama
- *Historical Lag*
- Diduga ada beb. individu anti Pancasila
- Belum ada contoh ideal manusia Pancasila

TANTANGAN

- (1) Islam dihadapkan atau dipertentangkan dengan Pancasila; dan
- (2) bergesernya nuansa ketuhanan (religius) ke nuansa sekuler atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.

LAHIRNYA PANCASILA

Berawal dari sebuah pertanyaan dari dr. Radjiman Wedjodiningrat, yaitu: Negara yang akan kita bentuk itu apa dasarnya?

(disampaikan pada awal sidang BPUPKI oleh Ketua BPUPKI dr. Radjiman Wedjodiningrat)

BUNG HATTA

Anggota terbanyak tidak mau menjawab pertanyaan itu karena khawatir, pertanyaan itu akan membawa pertikaian filosofis yang akan mengambil waktu yang panjang sekali. Ada yang mengemukakan, mana yang baiknya saja bagi Indonesia pada peralihan: demokrasi parlementer atau demokrasi yang memakai kabinet presidensiil seperti di Amerika Serikat. Pada hari ketiga agak tajam pertentangan antara golongan yang mengemukakan Negara Islam dan golongan yang mempertahankan Negara yang bebas dari pengaruh agama. Hanya Soekarno yang menjawab pertanyaan

Ketua Radjiman Wedjodiningrat. Pada hari keempat pada tanggal 1 Juni 1945, ia berpidato panjang-lebar yang lamanya kira-kira 1jam yang berpokok pada Panca Sila, lima dasar. Pidato itu disambut hampir semua anggota dengan tepuk tangan yang riuh. Tepuk-tangan yang riuh itu dianggap sebagai suatu persetujuan. Sebelum selesai siding hari itu, Ketua Radjiman Wedjodiningrat mengangkat suatu panitia kecil yang didalamnya duduk semua aliran, Islam, Kristen, dan mereka yang dianggap ahli konstitusi, untuk merumuskan kembali pokok-pokok pidato Soekarno itu. Panitia kecil itu menunjuk Sembilan di antara mereka untuk merumuskan kembali pidato Soekarno yang kemudian diberi nama Pancasila.

PANCASILA

- Tanggal 29, 31 Mei dan 1 Juni 1945
- Tanggal 22 Juni 1945
- Tanggal 18 Agustus 1945
- Tanggal 5 Juli 1945

TANGGAL 29, 31 MEI DAN 1 JUNI 1945

KONSEP RUMUSAN “LIMA ASAS” USULAN PRIBADI TENTANG DASAR NEGARA

Muhammad Yamin (29 Mei 1945)	Soepomo (31 Mei 1945)	Soekarno (1 Juni 1945)
1. Peri Kebangsaan	1. Persatuan	1. Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan	2. Kekeluargaan	2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan	3. Keimbangan lahir dan Batin	3. Mufakat atau Demokrasi
4. Peri Kerakyatan	4. Musyawarah	4. Kesejahteraan Sosial
5. Kesejahteraan Sosial	5. Keadilan Rakyat	5. Ketuhanan

TANGGAL 22 JUNI 1945

Prawoto Mangkusasmito:

Untuk pertama kali, Pancasila sebagai dasar Negara mendapatkan rumusnya yang lengkap pada 22 Juni 1945 dalam satu dokumen yang disusun dan ditandatangani oleh sebuah panitia yang terdiri dari Sembilan anggota Badan Penyelidik, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Mudzakir, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, KH. A. Wahid Hasim dan Mr. Mohammad Yamin

MUHAMMAD YAMIN

- Piagam Jakarta itulah yang menjadi Mukadimah (*preamble*) Konstitusi Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945, disusun menurut filosofi-politik yang ditentukan di dalam piagam persetujuan Konstitusi itu.

Muhammad Yamin (1954). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Djambatan), hlm. 20.

- Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fascisme, serta memuat dasar pembentukan dasar pembentukan Negara Republik Indonesia
- Tanggal 22 Juni dan 17 Agustus 1945 adalah dua saat dalam seluruh sejarah Indonesia yang demikian pentingnya

Piagam Jakarta berisi pula kalimat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945 itu. Piagam Jakarta itulah yang melahirkan Proklamasi dan Konstitusi

Muhammad Yamin (1954). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Djambatan), hlm. 20.

TERUMUSKANNYA PIAGAM JAKARTA

AM. FATWA

Oleh karena itu pula, tidak mengejutkan jika dalam rumusan *Preamble* hasil Panitia 9 (pengganti Panitia Delapan) tertanggal 22 Juni 1945 (yang dikenal sebagai Piagam Jakarta), *Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya* disepakati menjadi dasar Negara yang pertama dari susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Lukman Hakiem, Ed. (2013). *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia: Pemikiran dan Kiprah Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan KH. Abdul Kahar Mudzakir*. (Yogyakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah), hlm. iv.

Dr. RAJIMAN WIDJODININGRAT

(Ketua BPUPKI)

- *dengan suara sebulat-bulatnya.*
- Penerimaan secara bulat itu, tidak mungkin dilepaskan dari pengaruh dan wibawa Ketua panitia 9, Ir. Soekarno, yang sungguh-sungguh “memasang badan” mempertahankan rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dari berbagai kritik dan keberatan dari anggota BPUPKI.
- Bung Karno: Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya sukalah Saudara-Saudara menjalankan *offer* ini kepada tanah air dan bangsa kita, pengorbanan kita, supaya kita bisa lekas menyelesaikan supaya Indonesia merdeka bisa lekas damai.

LATAR BELAKANG DIHILANGKAN 7 KATA

MOHAMMAD HATTA

- Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Mohammad Hatta melakukan pendekatan kepada Tokoh-tokoh Islam, dengan melakukan pertemuan pendahuluan sebelum PPKI bersidang. Sebelumnya Hatta berjanji kepada opsir Jepang akan menyampaikan keberatan pada sila pertama, dengan mengatakan: bahwa esok hari dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan akan saya kemukakan masalah yang sangat penting itu. Saya minta ia menyabarkan sementara pemimpin-pemimpin Kristen yang berhati panas dan berkepala panas.

- Pada sore harinya saya menerima telepon dari Tuan Nasjimura, Pembantu Admiral Mayeda menanyakan, dapatkah saya menerima seorang opsir kaigun (angkatan laut), karena itu mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nisjimura sendiri akan menjadi juru-bahasanya. Saya persilahkan mereka datang. Opsir itu yang saya lupa namanya datang sebagai utusan kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai oleh angkatan laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi: *Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Mereka mengakui, bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minorita. Jika “diskriminasi” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

Saya katakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Waktu merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan pada tanggal 22 Juni ia ikut menandatangani. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan kaigun. Mungkin waktu itu Mr. Maramis Cuma memikirkan bahwa bagian kalimat tersebut berlaku hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasakan bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi. Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok daripada pokok, sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar pokok itu hanya mengikat sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun golongan yang terbesar, itu dirasakan oleh golongan minorita sebagai diskriminasi. Sebab itu kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu, mereka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.

ANHAR GONGGONG

Harus diingat oleh kita semua, bahwa rumusan Piagam Jakarta haruslah ditempatkan sebagai pertanda bahwa para pemimpin kita ketika itu – yang dipimpin oleh ketuanya Ir. Sukarno, telah menunjukkan “kemampuan” untuk menemukan formula yang dianggap dapat mempertemukan perbedaan pendapat di antara mereka.

St. Sularto dan D. Rini Yunarti (2010). *Konflik di Balik Proklamai: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan*. (Jakarta: Kompas), hlm. xvii.

PROSES KESEPAKATAN

MOHAMMAD HATTA

- Karena begitu seriusnya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Apabila suatu masalah yang serius dan bias membahayakan keutuhan Negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah benar-benar mementingkan nasib dan persatuan Negara.

Pada waktu itu kami dapat menginsyafi bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan Ketuhanan *dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya* dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mohammad Hatta (2016). *Untuk Negriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Otobiografi 3.*, hlm. 67.

MOHAMMAD NATSIR

Bangsa kita mempunyai sifat yang istimewa, yaitu sifat toleransi yang sudah menjadi darah-daging baginya semenjak dahulu sampai sekarang. Ini adalah modal positif yang mulia sekali dalam kalangan bangsa kita.

Mohammad Natsir (2016). *Revolusi Indonesia*. (Bandung: Segarsy), hlm. 17.

TANGGAL 18 AGUSTUS 1945

REVISI DASAR NEGARA

- Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
- Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya - diganti dengan rumusan: Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi: Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi: Presiden ialah orang Indonesia asli.
- Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi: pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

USIA PIAGAM JAKARTA

Piagam Jakarta hanya berusia 52 (lima puluh dua) hari, yaitu mulai dari tanggal 22 Juni 1945 hingga tanggal 17 Agustus 1945.

TANGGAL 5 JULI 1959

DASAR PERTIMBANGAN

- Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara;
- Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;
- Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
- Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi.

ISI DEKRIT 5 JULI 1959

- Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara.
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

SALAH SATU DIKTUM PERTIMBANGAN DEKRIT 5 JULI 1959

- Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

ISLAM DAN PANCASILA

- *Gentlemen's agreement*
- Jiwa besar umat Islam
- Toleransi para Pemimpin Islam

ALAMSYAH RATU PERWIRA NEGARA

Pancasila adalah hadiah umat Islam kepada Republik Indonesia tercinta.

Krisna R. Sempurnadjaya (Penyunting) – (1995). *H. Alamsyah Ratu Perwiranegara 70 Tahun: Pesan dan Kesan*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hlm. 59.



BASED CHANNEL

**TAUSIYAH
PANGLIMA TNI GATOT NURMANTYO
DI MTA
MAJLIS TAFSIR ALQURAN
"ISLAM BUKAN TERORIS"**



KETUHANAN YANG MAHA ESA: CIRI KHAS BANGSA INDONESIA

A photograph of Kwik Kian Gie, an Indonesian politician, speaking into a microphone. He is wearing a light blue shirt and glasses, and has his right hand raised in a gesture. The background is dark.

“Siapa sebenarnya yang suka menggunakan **SARA???** Negara kita kan negara yang berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa**, jadi **hormati dong** umat Islam yang tuhannya melarang memilih pemimpinnya yang non Muslim Itu artinya mereka (Muslim) **melaksanakan Pancasila**, sila kesatu....”

Kwik Kian Gie

MOHAMMAD HATTA

- Sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah fundamen moral. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang baik, sedangkan dasar Peri Kemanusiaan adalah kelanjutan dalam *perbuatan* dan *praktek hidup* daripada dasar-dasar yang memimpin tadi. Dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing., melainkan pula menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

ARNOLD MONONUTU

Arnold Mononutu, seorang Nasrani dan tokoh PNI, dalam pidato di konstituante: Pancasila merupakan manifestasi dari ajaran-ajaran Injil. Ketuhanan Yang Maha Esa bagi kami, pokok dan sumber dari sila-sila lain. Tanpa ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila akan menjadi suatu filsafat materialistis belaka

Lukman Hakiem, Ed. (2013). *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia: Pemikiran dan Kiprah Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan KH. Abdul Kahar Mudzakir*. (Yogyakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah), hlm. vii.

KASMAN SINGODIMEDJO

- Sebabnya ialah “Yang Maha Esa” menentukan arti dari ketuhanan. Pancasila yang kini secara geruisloos menjadi filsafat negara kita itu, tidak mengenal ketuhanan sembarang ketuhanan seperti barang sakti, patung, berhala, kuburan keramat, guru kebatinan, guru klenik, buatan manusia yang dianggap ampuh atau sakti, pelajaran kebatinan atau klenik, dogma teka-teki gaib, perhitungan-perhitungan sepekulatif, intelektualisme, diletantisme dan lain sebagainya; bukan! Sekali lagi bukan ketuhanan sembarang ketuhanan, tetapi yang dikenal Pancasila itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

ISLAMISASI PANCASILA

- Kuntowijoyo tentang demistifikasi Islam menekankan tentang perlunya Islam sebagai teks (al-Qur'an dan as-Sunnah) untuk dihadapkan kepada realitas, baik realitas sehari-hari maupun realitas ilmiah. Dengan kata lain, dari teks ke konteks (teks → konteks). Dalam ilmu berarti, bahwa gerakan intelektual Islam harus melangkah ke arah “pengilmuan Islam”. Kita harus meninggalkan “Islamisasi pengetahuan” yang berupa gerakan dari konteks ke teks (konteks → teks). Sementara itu, “pengilmuan Islam” bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu teks ke konteks.

KUNTOWIJOYO

- Demistifikasi Islam menekankan tentang perlunya Islam sebagai teks (al-Qur'an dan as-Sunnah) untuk dihadapkan kepada realitas, baik realitas sehari-hari maupun realitas ilmiah. Dengan kata lain, dari teks ke konteks (teks → konteks). Dalam ilmu berarti, bahwa gerakan intelektual Islam harus melangkah ke arah “pengilmuan Islam”. Kita harus meninggalkan “Islamisasi pengetahuan” yang berupa gerakan dari konteks ke teks (konteks → teks). Sementara itu, “pengilmuan Islam” bergerak ke arah yang berlawanan, yaitu teks ke konteks.

- Untuk melihat sila-sila dalam Pancasila seharusnya didasarkan pada teks ke konteks, bukan konteks ke teks. Jika sila-sila tersebut diberikan atau ditafsiri dengan ayat-ayat al-Qur'an, maka dapat dinyatakan sebagai "konteks ke teks".

PENDEKATAN EDUKATIF

- Menghindari *labeling* negatif
- Pendekatan menarik dan simpatik
- Pendekatan inklusif

KEISLAMAMAN DAN KEINDONESIAAN

SOEKARNO

Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? ialah hormat-menghormati satu sama lain.

MAHFUD MD

Islam Nasionalis, artinya Islam tetapi berkhidmat kepada bangsa dan negara.

Bukan Islam untuk Islam tapi Islam untuk bangsa dan negara yang Islami

AHMAD BASARAH

Islam dan nasionalisme atau golongan Islam dan golongan nasionalisme, ibarat dua rel kereta api yang harus berdampingan dengan kokoh dan seimbang. Jika salah satu relnya patah, maka bukan hanya kereta api yang berada di atasnya tidak dapat mengantarkan penumpangnya sampai ke tujuan, dan akibat fatalnya adalah kereta api itu akan terjungkal dan mencelakakan penumpang yang ada di dalamnya

AGUSSALIM SITOMPUL

Terintegrasinya antara pemikiran keislaman dan keindonesiaan di atas titik temu Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis. Tidak terdapat kesenjangan antara keislaman dan keindonesiaan, antara Islam dengan Pancasila, selaras dengan realitas sosial budaya bangsa Indonesia dengan ciri utama, pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan.

FATWA/JARGON/SLOGAN/SEMBOYAN
KH. HASYIM 'ASY'ARY

حُبُّ الْوَطَنِ
مِنْ الْإِيمَانِ
"CINTA
TANAH AIR
SEBAGIAN
DARI IMAN"

Kh. Hasyim Asy'ari)



@nahdatuloelam

KEISLAMAMAN DAN KEINDONESIAAN



- TURUT ANDIL MEMAJUKAN BANGSA
- BERAGAMA BERDASARKAN AJARAN AGAMANYA
- MENGHARGAI PERBEDAAN AGAMA

PENUTUP

- Pancasila sebagai dasar Negara RI pada saat Negara Indonesia didirikan atau diproklamasikan adalah Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta, karena Pancasila yang dirumuskan dan yang diberlakukan sampai saat ini adalah Pancasila yang dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 (sehari setelah Indonesia merdeka).
- Pancasila yang berlaku saat ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian atau kesinambungan, yaitu suatu keterkaitan dengan rumusan Pancasila sebelumnya.

- Sejak awal berdirinya NKRI umat Islam telah menunjukkan sikap kebersamaan, rela berkorban dan sangat toleran dengan siapa pun demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa.
- Dengan mengamalkan Pancasila dengan benar yang berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa, akan meningkatkan rasa percaya dan keyakinan, rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab akan tegaknya pancasila di NKRI.

- Pancasila pada dasarnya berkaitan dengan eksistensi (keberadaan) dan kelangsungan bangsa Indonesia, oleh karena itu, perlunya secara terus menerus Pancasila diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan kehidupan sebagai bentuk pengamalannya.

ENDANG SAIFUDDIN ANSHARI

Masalah Indonesia yang paling mendasar ialah bagaimana upaya agar seluruh lapisan masyarakat dan penduduk bangsa Indonesia merasa bahwa negeri dan bangsa Indonesia (termasuk Undang-Undang Dasar-nya ini) kepunyaan bersama mereka semua dan bukan hanya milik sekelompok golongan tertentu yang kebetulan berkuasa dan memerintah pada masa tertentu. Hal ini dapat terlaksana apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan jujur dan ikhlas menerima Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (dengan segala *konsiderans* dan *diktum*-nya) yang telah memberlakukan Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut dan menempatkannya pada latar belakang Piagam Jakarta, rumusan resmi pertama dan terasli Pancasila itu. Kemudian dengan jujur dan ikhlas pula melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen.

PANCASILA DAN AGAMA

- Secara historis, dapat dinyatakan bahwa antara Pancasila dan Islam merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan. Dengan kata lain dapat juga dinyatakan bahwa Pancasila merupakan bagian penting umat Islam Indonesia.
- Secara edukatif, dalam berdakwah umat Islam perlu melakukan pendekatan, paling tidak: (1) Pendekatan menarik dan simpatik; (2) Menghindari *labeling* negatif; dan (3) Pendekatan inklusif.

- Jika umat Islam sebagai mayoritas dapat memahami sejarah dan melakukan pendekatan edukatif maka akan turut menciptakan suasana dan iklim yang kondusif bangsa Indonesia, yang berarti juga menciptakan iklim yang kondusif dalam membangun bangsa.



Nomor: 1928 /XVI

Diagam

**Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
 dan**

**Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan
 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 (BP-7)**

dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA	: H. FURQOH HIDAYATULLAH,
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: Surakarta, 27 Juli 1960
NOMOR POKOK PESERTA	: 1928 /XVI
INSTANSI/ORGANISASI/UNSUR	: Universitas SEBELAS MARET
JABATAN	: Ketua Umum Bema. FKIP-UNS
ALAMAT	: Jaten, RT 13 no. 25 Karang - anyar, Surakarta

untuk mengikuti Penataan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) pada calon Penata Tingkat Nasional Angkatan XVI (Pendidikan Politik Pemuda Tingkat Kadet Nasional) yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979, Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0002/Wepora/1984 tanggal 16 Januari 1984, di Gubuar Jakarta dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April 1985 dengan hasil baik.

Jakarta, 1 April 1985

Kepala BP-7


SARWO EDHIE WIBOWO



Menteri Negara Pemuda
 dan Olahraga

Dr. ABDUL GAFUR

No : 022/X/P/DIK/2012



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

SERTIFIKAT

Dengan ini menyatakan bahwa :

Prof. Dr. M. Furgon Hidayatullah, MPA.

Kemendikbud RI

Telah berhasil menyelesaikan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XVIII di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dari tanggal 17 April s.d 25 Oktober 2012 dengan predikat *Dengan Pujian*



Jakarta, 25 Oktober 2012

GUBERNUR

Budi Susilo Soepandji

BUDI SUSILO SOEPANDJI



TERIMA KASIH

